



OPTIMALISASI PENDIDIKAN MASYARAKAT OLEH UNIT DIKYASA SATLANTAS GUNA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA

Rangga Setyadi
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: rangga_setyadi@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran lantasi yang dilakukan pelajar membutuhkan penanganan. Oleh karena itu dalam penelitian ini rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Optimalisasi Dikmas Lantasi oleh Unit Dikyasa dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga. Teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisa adalah teori manajemen, teori komunikasi, konsep optimalisasi dan dikmas lantasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian evaluasi program. Fokus penelitian ini upaya Satuan Lantasi terutama Unit Dikmas Lantasi dalam menangani pelanggaran yang dilakukan para pelajar. Lokasi penelitian di kota Purbalingga dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen melalui sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lantasi yang dilakukan pelajar mengalami peningkatan sejalan dengan semakin banyaknya pelajar yang menggunakan kendaraan, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelanggaran lantasi berasal dari faktor internal dan eksternal. Sedang upaya optimalisasi dalam mengurangi pelanggaran lantasi melalui cara penerangan dan penyuluhan kepada pelajar yang diprogramkan dalam Dikmas lantasi. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Unit Dikmas Lantasi Polres Purbalingga sudah melaksanakan tugasnya, tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya SDM yang mengawali. Oleh karena itu sebagai saran dalam penelitian ini adalah

perlunya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil Dikyasa dalam mengurangi pelanggaran lintas sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: Optimalisasi – Dikmas lintas–Pelanggaran lintas

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang berkedudukan dibawah Presiden. Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat (UU No 2 Tahun 2002 pasal 13). Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maka di dalam lembaga kepolisian terbagi dalam fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut ada fungsi Sabhara, Reserse, Lalu Lintas, Binmas, Brimob, Intelijen, Polisi Air dan lain-lain.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara kamseltibcar lintas. Salah satu tugas polisi lalu lintas adalah melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan-aturan dalam berlalu lintas di jalan.

Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lintas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas. Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di bidang lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalu lintas dan memberikan pemahaman terhadap bagaimana cara berkendara yang baik serta benar sebagai pengguna jalan, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktitas aksititas masyarakat. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas terutama Unit Dikmas Lintas mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Masalah lalu lintas yang sering terjadi di Purbalingga adalah pelanggaran lalu lintas yang pada akhirnya mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lintas). Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Purbalingga tersebut cenderung didominasi oleh golongan pelajar sehingga menyebabkan tidak terciptanya kamseltibcar lintas di wilayah kota

Purbalingga. Sebagai akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Purbalingga khususnya pelajar yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan, seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Purbalingga 2014-2016

Tahun	Pelanggaran
2014	23.758
2015	15.918
2016	22.562

Sumber : Lapsat Polres Purbalingga 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2014 sejumlah 23.758 (dua puluh tiga tujuh ratus lima puluh delapan) mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 15.918 (lima belas Sembilan ratus delapan belas), dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 22.562 (dua puluh dua lima ratus enam puluh dua). Jadi perkembangan pelanggaran lalu lintas di Polres Purbalingga pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami naik turun / Fluktuatif.

Pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan suatu permasalahan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan juga kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas ini jika tidak segera dilakukan penanganan dengan cepat tentu setiap tahunnya akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan perbandingan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan peningkatan jumlah jalan yang dibangun tidak sebanding, akibatnya masalah lalu lintas akan tetap menjadi permasalahan yang fenomenal dan akan terus diperbincangkan di masa mendatang, apalagi masalah lalu lintas yang berdampak pada kecelakaan. Sedangkan dampak dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri berpengaruh terhadap kerugian jiwa dan harta benda, hal ini sesuai dengan penjelasan UU No 22 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Dalam hal ini, Polri sebagai salah satu aparaturnya yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 ayat (1) huruf (b) bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 5 ayat (3) huruf (e) bahwa “Urusan pemerintahan di bidang registrasi

dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Maka perlu adanya upaya dari Polri khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga yang merupakan unsur pelaksana dari organisasi kepolisian mengenai fungsi lalu lintas untuk menciptakan kamseltibcar lantas di wilayah Purbalingga.

Namun, seperti yang dikatakan di atas bahwa pengendalian lalu lintas perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu peran aktif dari masyarakat dalam membantu polisi untuk mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin masyarakat dalam melakukan aktivitas di jalan raya yang mana hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 258, bahwa “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”. Rasa kesadaran dan disiplin berlalu lintas yang dapat menciptakan situasi kamseltibcar lantas di wilayah Purbalingga berjalan dengan baik dan terpadu.

Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu cerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa khususnya kota Purbalingga. Oleh karena itu, selayaknya Polres Purbalingga lebih mengedepankan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas yang menjadi tanggung jawab Unit Dikyasa Lantas. Strategi dan program untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui aspek pendidikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (dikmas lantas) terhadap masyarakat terorganisir yaitu pelajar, hal ini sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) bahwa dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas dapat dilaksanakan kepada kelompok masyarakat terorganisir seperti pelajar, yang diantaranya dapat dilaksanakan melalui PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Pramuka Saka Bhayangkara, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi. Dikmas lantas terhadap pelajar merupakan bentuk upaya *preventif* dari Polri khususnya oleh Polres Purbalingga dalam menanggulangi masalah lalu lintas yang terjadi dan menjadi penyangga untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu lintas. Salah satu bentuk upaya Polri dalam menanggulangi masalah lalu lintas yang bersifat preventif yaitu penanaman disiplin berlalu lintas akan lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari bila dimulai sejak dini sehingga dikmas lantas terhadap pelajar tingkat SMP, hingga pelajar tingkat SMA/SMK/MA perlu dioptimalkan untuk menanamkan disiplin berlalu lintas. Dengan harapan dapat mengatasi masalah lalu lintas yang terjadi di Purbalingga dan akhirnya menciptakan situasi kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga serta pelaksanaannya dapat sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat

Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dengan perencanaan yang baik, terus-menerus, konsisten dan berkesinambungan. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka perlu kiranya peneliti meneliti dengan judul : “Optimalisasi Pendidikan Masyarakat oleh Unit Dikyasa Satlantas Guna Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga.”

1.2 Perumusan Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Optimalisasi Dikmas Lantas oleh Unit Dikyasa dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga?” Selanjutnya dari permasalahan tersebut maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan Pendidikan Masyarakat lalu lintas terhadap pelajar oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga guna mengurangi pelanggaran lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga saat ini?
- b. Apakah Dikmas Lantas yang di lakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga sudah optimal?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pendidikan Masyarakat lalu lintas terhadap pelajar oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga guna mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga?
- d. Bagaimana optimalisasi Pendidikan Masyarakat oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Purbalingga guna mengurangi pelanggaran lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas terhadap pelajar oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga guna mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah Pendidikan Masyarakat oleh Unit Dikyasa Satlantas guna mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga sudah optimal atau belum.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Unit Dikyasa di dalam pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas terhadap pelajar guna menciptakan kesadaran berlalu lintas dalam rangka mengurangi pelanggaran lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga.
- d. Untuk mengetahui bagaimana Unit Dikyasa dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas terhadap pelajar guna

menciptakan kesadaran berlalu lintas dalam rangka mengurangi pelanggaran di wilayah hukum Polres Purbalingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikembangkan, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan khususnya di Polres Purbalingga dalam hal fungsi lalu lintas terkait pendidikan masyarakat bidang lalu lintas terhadap pelajar yang menunjang bagi Polres Purbalingga untuk menurunkan dan mengatasi pelanggaran lalu lintas guna menciptakan kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

b. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu kepolisian, menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya tentang fungsi lalu lintas terkait pendidikan masyarakat baik secara teoritis ataupun kondisi riil yang terjadi di lapangan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan penelitian untuk para pembaca, terutama peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis, dengan cara-cara tertentu dan terencana, dalam mengkaji suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecah masalah permasalahan yang sedang dihadapi. “Pengetahuan teoritis hasil penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena didukung oleh justifikasi teoritis yang logis dan empirik yang sah. Oleh karena itu penelitian dapat juga dikatakan sebagai cara mencari atau menemukan kebenaran melalui metode ilmiah”. (Bahan Ajar Metodologi Penelitian, 2012:4). Hal ini sejalan dengan Muhammad dan Djaali (2005:1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian adalah :

Rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan

untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam penulisan skripsi, penulis berusaha mencari referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini guna mendukung tulisan yang dibuat dengan dasar teori yang kuat dan dapat dibuktikan keilmiahannya. Salah satu untuk mendukung tulisan ini adalah dengan menggunakan kepustakaan penelitian. Kepustakaan penelitian yang digunakan adalah hasil karya peneliti oleh Sigit, Mahasiswa STIK PTIK angkatan 54 dengan judul skripsi “Peranan Satuan Lalu Lintas Polres Kaur Dalam Mengurangi pelanggaran Lalu Lintas”. Latar belakang penelitian Sigit menggambarkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kaur dapat menimbulkan terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaraan lalu lintas bagi masyarakat. Bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kaur diantaranya adalah tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, tidak menyalakan lampu, dan lain sebagainya. Faktor yang melatar belakangnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya informasi lalu lintas, dan tidak terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sehingga dengan adanya permasalahan tersebut Sigit melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai peranan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Kaur dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan memberikan saran kepada pimpinan untuk mengikut sertakan anggota satuan lalu lintas dalam dikjur, peningkatan koordinasi dengan dinas perhubungan dan pekerjaan umum, serta penambahan jumlah sarana kendaraan bermotor.

Dalam penelitian Sigit menggunakan teori peran, teori SWOT, Konsep Koordinasi, Konsep Manajemen Operasi Polri, Konsep Pelayanan Prima, Konsep Penegakkan Hukum bidang lalu lintas. Selain itu Sigit menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif dengan metodi studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian dari Sigit menggambarkan bahwa :

1. Situasi dan kondisi arus lalu lintas yang terdapat di Kabupaten Kaur cukup padat, akibat dari tingginya volume kendaraan bermotor (baik roda dua maupun empat) yang melintas di jalan raya serta keberadaan Kabupaten Kaur sebagai daerah penghubung menuju kota Bengkulu maupun daerah lainnya. Namun, kondisi jalan yang ada sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, masalah pelanggaran lalu lintas juga sering terjadi (umumnya dilakukan oleh pengendara sepeda motor), sehingga dapat mengganggu perwujudan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kaur.
2. Peranan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kaur dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas hingga saat ini sudah dilakukan cukup baik, dimana personil, mampu menyelenggarakan kegiatan pre-emptif, preventif dan

represif. Dalam melakukan upayanya tersebut maka pimpinan sudah merencanakan kegiatan tersebut, dengan tujuan agar masalah pelanggaran lalu lintas dapat dicegah semaksimal mungkin agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas di jalan raya. Selain itu, personil juga telah menunjukkan kemampuannya yang baik saat melaksanakan tugas sehingga memberikan kepuasan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu factor internal yang mendukung peran Satuan Lalu Lintas Polres Kaur dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kaur dengan perencanaan tugas yang dilakukan Kasat Lantas Polres Kaur berdasarkan sumber daya manusia, sarana, koordinasi, dengan pihak terkait dan lain sebagainya. Faktor internal yang menjadi penghambat adalah minimnya jumlah personil dan masih belum meratanya kegiatan pendidikan kejuruan di bidang lalu lintas yang diterima oleh personil, serta sarana yang tidak memadai (khususnya untuk kendaraan bermotor) adapun factor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas satuan lalu lintas Polres Kaur adalah terjadinya koordinasi dua arah dengan sejumlah institusi sekolah serta media massa. Factor eksternal yang menghambat adalah tidak berjalannya koordinasi dengan dinas perhubungan (khususnya masalah pemasangan rambu lalu lintas) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas.

Dari hasil penelitian Sigit di atas, maka ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Persamaan:
 - a. Dalam penelitiannya Sigit dan penulis membahas mengenai peranan dari Satuan Lalu Lintas Polri dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas salah satunya melalui program pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
 - b. Dalam penelitiannya Sigit dan penulis menggunakan konsep pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
 - c. Pendekatan penelitian yang digunakan Sigit dan penulis adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelitian kepustakaan
2. Perbedaan:
 - a. Tema penelitian dari Sigit lebih memfokuskan pada peranan Satuan Lalu Lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas sedangkan penulisan ini membahas mengenai Optimalisasi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas oleh Unit Dikyasa Satlantas guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.
 - b. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Sigit adalah wilayah Polres Kaur sedangkan untuk penulis melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polres Purbalingga.

Kemudian kepustakaan penelitian yang kedua adalah hasil karya penelitian oleh Sulaksono Budiman, mahasiswa STIK PTIK angkatan XLIII dengan judul skripsi. "Manajemen Dikmas Lantas Bagi Siswa Sekolah Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas Lantas di Wilayah Hukum Polres Sleman". Penelitian yang dilakukan

oleh Budiman Sulaksono tersebut memiliki kesimpulan yaitu: 1.) pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas di Polres Sleman sesuai dengan Juklak Kapolri No. Pol : Juklak/05/2003, tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lantas). Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan penerangan, bimbingan, penyuluhan, serta ceramah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, 2.) Manajemen yang diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas Unit Dikmas Lantas dalam rangka mewujudkan kamtibmas di Kabupaten Sleman berjalan baik yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen POSDCORB (planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting), 3.) pelaksanaan kegiatan dikmas lantas yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sleman Unit Dimas Lantas ini dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu; kemampuan komunikasi personil polisi dalam menyampaikan materi kamtibmas, kemampuan mengendalikan serta mengkoordinir penyelenggaraan penerangan lalu lintas, kemampuan menganjurkan/mengajak/menghimbau untuk melaksanakan tertib berlalu lintas, kemampuan memberikan contoh tertib berlalu lintas, dan kemampuan mewujudkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kamtibmas.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama mengetengahkan kegiatan dikmas lantas dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada variable khusus penelitian dimana Budiman Sulaksono lebih meninjau manajemen dikmas lantas dalam mewujudkan kamtibmas, sedangkan peneliti lebih kepada Optimalisasi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas oleh Unit Dikyasa Satlantas guna mengurangi pelanggaran lalu lintas, kemudian terdapat perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan.

Setelah melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian Budiman Sulaksono dengan penelitian yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini, maka skripsi ini sebagai pembanding dan diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi studi terdahulu. Oleh karena itu, terdapat unsur kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu pelaksanaan dikmas lantas terhadap pengguna jalan oleh unit dikyasa lantas, factor-faktor yang mempengaruhi dikmas lantas terhadap pengguna jalan oleh unit dikyasa lantas, dan upaya yang telah dilakukan oleh unit dikyasa lantas untuk mengoptimalkan dikmas lantas terhadap pengguna jalan.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam kepustakaan konseptual akan membahas tentang teori dan konsep dari para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana teori dan konsep tersebut digunakan untuk memberi batasan dalam pembahasan.

2.2.1 Konsep Optimalisasi

Istilah optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:283) bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi.

Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi lebih baik atau paling tinggi. Optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Optimal adalah berusaha untuk memaksimumkan sesuatu yang diinginkan. Secara garis besar, optimalisasi adalah tindakan untuk memberikan hasil yang paling baik, apakah itu hasil maksimal ataupun hasil minimum, untuk membuat sistem yang seefektif mungkin untuk menemukan yang terbaik dari semua solusi yang mungkin.

2.2.2 Konsep Dikmas Lantas

Dikmas Lantas adalah Pendidikan masyarakat tentang Lalu Lintas yaitu segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan. Dikmas Lantas menurut H.S. Djajoesman adalah suatu aktivitas yang meliputi:

- a. Memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagaimana mereka harus bergerak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan-peraturan untuk menghindarkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
- b. Memberi nasihat atau teguran sebagai perintah atau petunjuk, tetapi tidak sebagai celaan.
- c. Jika tindakan diatas gagal dalam pelaksanaannya, maka diadakan penangkapan (tindakan-tindakan dan perkaranya diajukan ke muka sidang pengadilan) agar pelanggar mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Berdasarkan Juklak Kapolri No.pol : Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas bahwa kegiatan dikmas lantas terhadap masyarakat teroganisir seperti pelajar secara garis besar dilakukan dengan langkah-langkah yaitu :

- a. Tahap perencanaan dan persiapan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap penilaian

2.2.3 Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas (UU LLAJ, tahun 2009). Sedangkan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang yang berada di jalan dan fasilitas pendukung lainnya (Diktat Akpol, 2013). Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat (6) dan ayat (12) menjelaskan bahwa prasaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Kemudian ayat (12) menjelaskan bahwa yang

dimaksud jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, kemudian untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat (UU LLAJ, tahun 2009)

2.2.4 Kamseltibcar Lantas

Kamseltibcar lantas adalah singkatan dari keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal (1) angka (30) menjelaskan pengertian keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, pasal (1) angka (31) menjelaskan pengertian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, pasal (1) angka (32) menjelaskan pengertian ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, dan pada pasal (1) angka (33) menjelaskan pengertian kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

2.2.5 Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas (Diktat Akpol, 2013). Pelanggar lalu lintas dilakukan oleh pengemudi bermotor maupun tidak bermotor. Pelanggaran lalu lintas dapat berupa melanggar rambu lalu lintas seperti *traffic light*, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan bermotor yang tidak lengkap, tidak membawa surat-surat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Menurut buku petunjuk teknis tentang penggunaan Blanko Tilang, menerangkan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan

menggunakan kendaraan bermotor, maupun pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah dibuktikan.

2.2.6 Teori Manajemen

Teori manajemen yang penulis gunakan adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry yang terkenal dengan istilah POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) atau dengan bahasa Indonesia yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun arti dari POAC tersebut yaitu :

a. *Planning*

Planning adalah rangkaian aktivitas untuk menetapkan terlebih dahulu tentang tujuan yang ingin dicapai pada suatu jangka waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.

b. *Organizing*

Organizing yaitu proses dan rangkaian aktivitas dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk di selesaikan oleh anggota-anggota kelompok pekerjaan, penentu hubungan-hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, dan penciptaan lingkungan yang harmonis serta fasilitas pekerjaan yang memadai.

c. *Actuating*

Actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

d. *Controlling*

Controlling adalah proses dan rangkaian aktivitas untuk mengusahakan agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga apabila ada aktivitas yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan-tahapan tersebut diadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

2.2.7 Teori Komunikasi organisasi

Menurut Everest M Rogers yang dikutip dari Hafied Cangara (2006:19) definisi komunikasi yaitu dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya komunikasi (pengalihan ide) diharapkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan oleh penyampai ide (komunikator). Dalam kegiatan Dikmas lintas komunikasi merupakan hal yang utama dalam menyampaikan pesa-pesan pendidikan berlalu lintas bagi masyarakat. Menurut pendapat dari Suryosubroto (2004:21) yang menyatakan bahwa :

Manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita maksudkan, dan kita juga mengerti apa yang dimaksudkan orang lain itu. Jika dalam kerja sama pendidikan tidak ada komunikasi, maka orang yang bekerja sama itu saling tidak mengetahui apa yang dikerjakan atau apa yang diinginkan teman sekerjanya. Keberhasilan pencapaian tujuan dari dikmas lantas tergantung pada komunikasi yang digunakan. Penyampaian pesan oleh komunikator tentang apa yang dikatakan serta media yang digunakan menentukan sejauh mana komunikan (penerima pesan) mengerti tentang pesan yang disampaikan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi dampak atau akibat dari penyampaian pesan itu sendiri. Tentunya akibat yang ingin ditimbulkan ialah terjadinya nilai-nilai yang diinginkan komunikator (penyampai pesan) terhadap komunikan (penerima pesan) melalui pesan yang disampaikan.

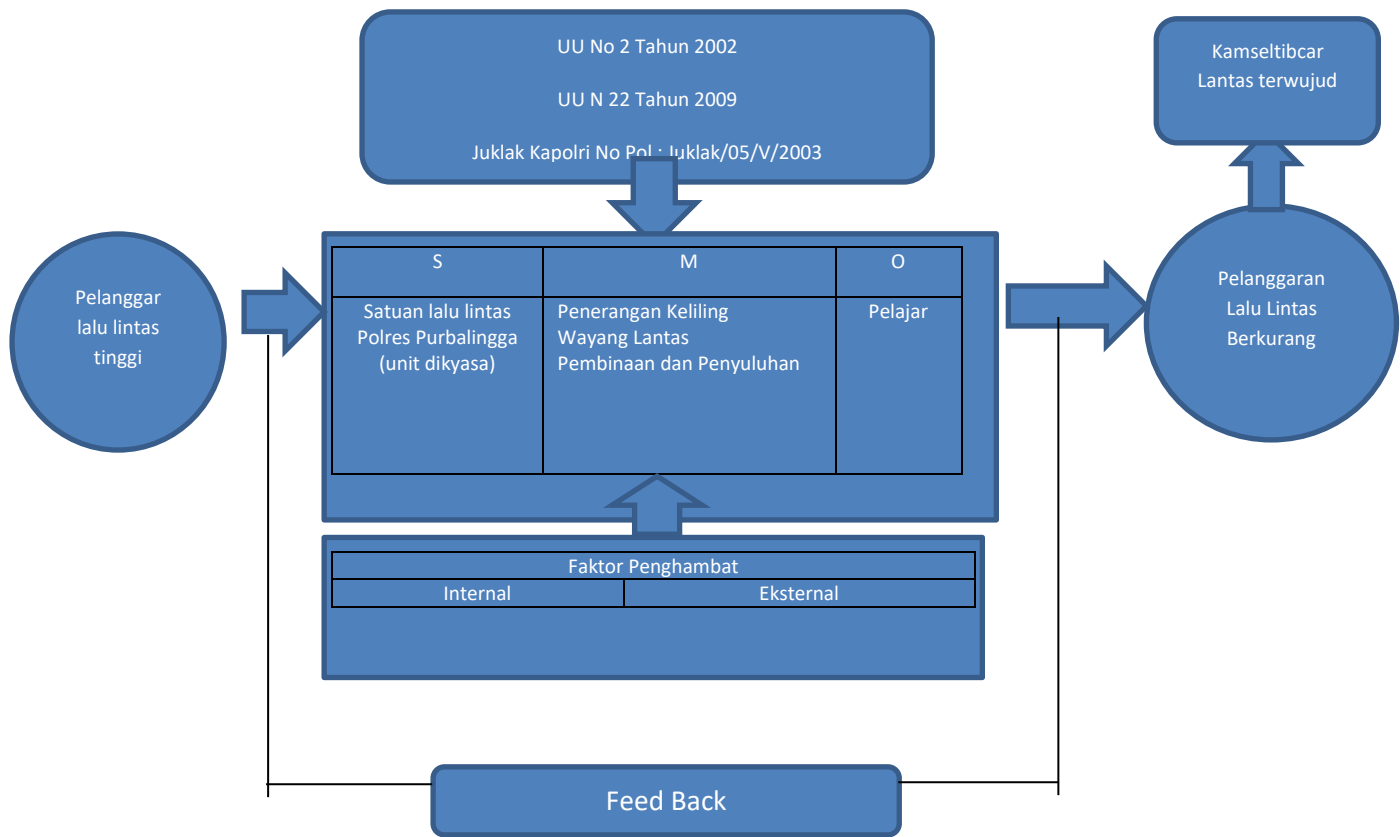
Penulis menggunakan teori komunikasi untuk membantu menganalisis proses komunikasi yang digunakan dalam kegiatan Dikmas Lantas oleh Satuan Lantas Polres Purbalingga dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu alur pikir penulis untuk menjelaskan secara deskriptif menurut daya pikir dalam penelitian itu sendiri sehingga dapat dilihat dengan jelas arah pemikiran penulis. Selain itu, kerangka berpikir juga berarti cara bekerja dan bagaimana membuat kajian untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Dilihat dari kerangka berpikir diatas maka kerangka berpikir pada penelitian ini berawal dari adanya dasar-dasar hukum pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Juklak Kapolri No.Pol : Juklak/05/V/2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pendidikan Masyarakat bidang Lalu Lintas dimana masalah lalu lintas yang terjadi yaitu tingginya pelanggaran lalu lintas kemudian adanya Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga yang bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut untuk membentuk kedisiplinan berlalu lintas dengan berdasarkan pada aturan yang ada dan berlaku mengenai lalu lintas yaitu melalui Pendidikan Masyarakat lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Lalu Lintas terhadap pelajar dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian adanya optimalisasi yang telah dilakukan oleh Unit Dikyasa Lalu Lintas Polres Purbalingga terhadap pelajar guna mengurangi Pelanggaran lalu lintas agar terwujud kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai optimalisasi Kegiatan Dikmas Lantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga, menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian kualitatif disebut *participant-observation* karena peneliti itu sendiri yang harus menjadi instrument utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya (Irawan,2006). Menurut Djunaidi dalam mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur *statistic* atau dengan cara-cara kuantifikasi. Djunaidi menjelaskan bahwa :

(Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena social atau lingkungan *social* yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Latar *social* tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar apa dan bagaimana kejadian itu terjadi siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dimana tempat kejadiannya.)

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sandy (2012), terdapat lima ciri utama penelitian kualitatif, yaitu:

1. Naturalistik. Penelitian kualitatif memiliki latar actual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan *instrument* kunci.
 2. Data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.
 3. Berurusan dengan proses. Penelitian kualitatif lebih berkonsentrasi pada proses dari pada dengan hasil ataupun produk.
 4. Induktif. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data mereka secara induktif.
 5. Makna. Makna adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif.
- Dari ciri-ciri di pendekatan kualitatif di atas, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mencari informasi dengan cara penelitian langsung di lapangan sebagai bahan temuan kemudian temuan tersebut dalam pembahasannya disajikan dalam bentuk data deskriptif sesuai dengan keadaan di lapangan.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif maka penulis dapat terlibat secara langsung dilapangan untuk meneliti sejumlah objek penelitian mengenai optimalisasi kegiatan dikmas lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga. Hal-hal yang menjadi penemuan peneliti akan menentukan langkah serta kualitas pelayanan lalu lintas yang diberikan Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

3.1.2 Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan optimalisasi kegiatan Dikmas Lintas dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas guna mewujudkan Kamseltibcar lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga, penulis menggunakan metode penelitian Evaluasi Program (*Program Evaluation*), dimana peneliti berupaya agar lebih mendalami tentang optimalisasi kegiatan dikmas lintas terhadap pengguna jalan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga guna mewujudkan kamseltibcar lintas. Metode evaluasi program, yaitu penelitian yang berkaitan dengan suatu program tertentu untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan mengenai program tersebut dilihat dari segi efektifitas, kelayakan, biaya, dan lain-lain. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dengan metode ini akan mendapatkan gambaran nyata dari objek yang akan diteliti kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menuntut persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya kriteria, tolok ukur, atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh, setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria itulah yang dicari. Dari kesenjangan tersebut diperoleh gambaran apakah objek yang diteliti sudah sesuai, kurang sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria. Selain itu, dengan metode ini peneliti dapat mengumpulkan data tentang keterlaksanaan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas dari program yang di evaluasi. Dalam hal ini, peneliti dapat mengetahui pelaksanaan dikmas lintas terhadap pengguna jalan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga dengan berdasarkan kriteria teori manajemen dan teori komunikasi yang menjadi tolak ukur.

3.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2012). Fokus penelitian adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti (Irawan, 2006). Dari dua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian adalah suatu objek yang berisi pokok masalah yang menjadi titik pusat penelitian.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah upaya satuan lantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di kalangan masyarakat terutama di wilayah hukum Polres Purbalingga, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas kepada pelajar di wilayah hukum Polres Purbalingga yang semakin marak melakukan pelanggaran Lalu Lintas di Purbalingga. Dengan adanya upaya satuan lantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas diharapkan agar terciptanya kamseltibcar lantas, berkurangnya pelanggaran lalu lintas dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah Purbalingga. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Purbalingga karena didasarkan kepada hasil pembagian tempat penelitian.

3.4 Sumber Data/Informasi

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian evaluasi program, maka untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data peneliti mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkatan huruf *p* dari bahasa Inggris, Sebagai Berikut :

3.4.1 *Person*

Person merupakan sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini, sumber data berupa orang yang dimaksud adalah:

- a. Kapolres Purbalingga
- b. Kasat Lantas Polres Purbalingga
- c. Kanit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga
- d. Anggota Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga
- e. Pelajar
- f. Guru

3.4.2 *Place*

Place merupakan sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam misalnya ruangan,

kelengkapan alat, wujud benda dll, sedangkan bergerak misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, belajar-mengajar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini sumber data tempat adalah kantor Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, dan sekolah-sekolah yang pernah menerima pendidikan masyarakat tentang lalu lintas dari Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga.

3.4.3 *Paper*

Paper merupakan sumber data berupa simbol, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam Penelitian ini sumber data paper adalah alat peraga dalam melakukan dikmas lantas terhadap pelajar, administrasi surat, dokumentasi foto dan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

“Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang diketik atau pita video/ audio tentang percakapan yang berisi penggalan data yang jamak nantinya dipilah-pilah dan dianalisis. Proses ini dilaksanakan dengan jalan membuat kode dan mengkategorikan data” (Moleong, 2011:235). Agar dapat diperoleh gambaran tentang data maka fakta-fakta terhadap penelitian dan mendukung penulisan ini maka digunakan teknik pengumpulan data.

3.5.1 Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari sumber manusia. Pedoman wawancara yang di gunakan peneliti untuk penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.

3.5.2 Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dari sumber data tempat. Pengamatan dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara aktif yaitu peneliti secara langsung berada di tempat kegiatan yang diteliti dengan menggunakan alat bantu kamera.

3.5.3 Studi Dokumen/ Kepustakaan

Data pelengkap dari kegiatan wawancara serta pengamatan (*observasi*) di lapangan. Dengan menggunakan studi dokumen ini, penulis memperoleh

informasi secara tertulis, yaitu dokumen yang diberikan oleh sumber informasi dalam penelitian. Menurut Djunaidi (2012:199) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi berdasarkan beberapa pandangan pakar penelitian kualitatif, dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Selain itu, dalam menggunakan studi dokumen penulis mencari *literature* yang berhubungan dengan optimalisasi kegiatan dikmas lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

3.6 Validitas dan Realibilitas

Data penelitian harus dicek keakuratan dan keajegan datanya. Validitas data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data tertulis (Juknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi S-1 Taruna Akpol 2016:19). Berikut adalah pengertian dari ke tiga metode tersebut

1. Konfirmabilitas (confirmability)
Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Prof. Dr. Sugiyono 2009:277)
2. Transformabilitas
Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistic, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi social lain (Sugiyono, 2009:276)
3. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2009:273)

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam metode penelitian evaluasi program adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna kemudian mencari penyebab mengapa terjadi demikian, dimana berpikir tentang kaitan antar data dan mungkin dengan latar belakang yang menyebabkan adanya

persamaan atau perbedaan tersebut sehingga mendekatkan data yang diperoleh dengan kesimpulan penelitian. Adapun tahap-tahap analisa data tersebut yaitu penggolongan atau klasifikasi data sesuai dengan pokok permasalahan, kodifikasi atau pengkodean data, menghubungkan data yang telah diklasifikasikan dengan acuan dasar yang seharusnya dan akhirnya menarik kesimpulan, sehingga dapat melihat dan menggambarkan kesesuaian pelaksanaan riil dengan acuan dasarnya dikmas lantas terhadap pengguna jalan oleh Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga dalam rangka menciptakan kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, pengamatan (*observasi*), dan studi dokumentasi mengenai optimalisasi kegiatan dikmas lantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga direduksi. Proses reduksi dilakukan dengan memilih dan memilah data-data yang ada kaitannya dengan penelitian sehingga lebih *focus* kepada permasalahan yang diangkat. Melalui reduksi data, data yang ada dikelompokkan dan diseleksi untuk *eliminasi* sejumlah data yang kurang *focus* terhadap permasalahan yang diangkat sehingga bersifat lebih *focus* dan bersifat ilmiah.

3.7.2 Sajian (*Display*) Data

Sajian atau Display data merupakan cara yang dilakukan untuk menyajikan data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, *table*, dan hasil wawancara maupun pengamatan yang diperoleh dari pengamatan (*observasi*) dan wawancara, disajikan berdasarkan hasil kegiatan penelitian di lapangan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Data yang diperoleh selama penelitian di lapangan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan (*observasi*) dan wawancara di lapangan mengenai optimalisasi kegiatan Dikmas Lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum di Purbalingga

Gambaran Umum yang ada di Purbalingga dalam hal ini adalah wilayah hukum Polres Purbalingga dan tingkat kesadaran pelajar dalam berlalu lintas di jalan raya di tampilkan dengan data sebagai berikut :

4.1.1 Letak Geografis Kota Purbalingga

Letak geografis yang penulis tuangkan dalam penulisan ini adalah tentang letak dan kondisi geografis, batas daerah dan luas daerah dari wilayah hukum Polres Purbalingga, yaitu:

- a. Letak dan kondisi Geografis

Posisi Polres Purbalingga terletak di antara $109^{\circ}011'$ – $109^{\circ}035'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}10'$ – $7^{\circ}29'$ Lintang Selatan, di bagian Barat Daya Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Daerah hukum polres Purbalingga terbagi menjadi 18 kecamatan membawahi 224 Desa dan 15 Kelurahan dengan perincian Wilayah sebagai Berikut :

a. Luas Wilayah Kecamatan Kemangkon	: 45,13 Km ²
b. Luas Wilayah Kecamatan Bukateja	: 42,40 Km ²
c. Luas Wilayah Kecamatan Kejobong	: 39,99 Km ²
d. Luas Wilayah Kecamatan Pengadegan	: 41,75 Km ²
e. Luas Wilayah Kecamatan Kaligondang	: 50,54 Km ²
f. Luas Wilayah Kecamatan Purbalingga	: 14,72 Km ²
g. Luas Wilayah Kecamatan Kalimanah	: 22,51 Km ²
h. Luas Wilayah Kecamatan Padamara	: 17,27 Km ²
i. Luas Wilayah Kecamatan Kutasari	: 52,90 Km ²
j. Luas Wilayah Kecamatan Bojongsari	: 29,25 Km ²
k. Luas Wilayah Kecamatan Mrebet	: 47,89 Km ²
l. Luas Wilayah Kecamatan Bobotsari	: 32,38 Km ²
m. Luas Wilayah Kecamatan Karangreja	: 74,49 Km ²
n. Luas Wilayah Kecamatan Karangjambu	: 46,09 Km ²
o. Luas Wilayah Kecamatan Karanganyar	: 30,55 Km ²
p. Luas Wilayah Kecamatan Kertanegara	: 38,02 Km ²
q. Luas Wilayah Kecamatan Karangmoncol	: 60,27 Km ²
r. Luas Wilayah Kecamatan Rembang	: 91,59 Km ²
Total Luas Wilayah	: 777,64 Km ²

Gambar 4.1
Peta Wilayah Purbalingga



Purbalingga memiliki posisi geostrategis karena berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebuah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, kali pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali Gintung, dan anak sungai lainnya. Ibu kota Kabupaten berada di Purbalingga, sekitar 21 km sebelah timur laut Purwokerto. Di Purbalingga banyak industri dengan bahan baku rambut manusia untuk dijadikan bulu mata palsu (*eye-lash*) atau juga dibuat wig atau rambut palsu serta sanggul maupun *hair*

piece yang dipasang untuk memberikan tambahan rambut atau juga *high-light* secara temporer. Keistimewaan lain adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari industri kuali dan panci tembaga. Knalpot *Braling* cukup terkenal di kalangan pemilik mobil, sebagai alternatif suku cadang murah.

b. Batas – batas daerah :

- 1.) Sebelah Utara berbatasan dengan pemalang Karesiden Pekalongan.
- 2.) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
- 3.) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara.
- 4.) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

c. Luas daerah

Luas keseluruhan daerah Polres Purbalingga 777,64 Km². Secara administratif daerah Polres Purbalingga terbagi menjadi 18 kecamatan membawahi 224 desa dan 15 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Rembang, dengan luas wilayah 91,59 Km² dan Kecamatan Karangreja, dengan luas wilayah 74,49 Km². Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian Utara yang merupakan daerah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Padamara, dengan luas wilayah 17,27 Km² diikuti oleh Kecamatan Purbalingga, dengan luas wilayah 14,72 Km².

4.1.2 Demografi Purbalingga

Demografi yang penulis tuangkan dalam penulisan ini adalah tentang jumlah penduduk, dan pendidikan dari penduduk di wilayah hukum Polres Purbalingga, yaitu:

a. Jumlah penduduk

Penduduk di wilayah Polres Purbalingga sebanyak 930.724 jiwa yang terdiri dari:

1. Laki-laki : 471.836 jiwa
2. Perempuan : 458.888 jiwa

b. Pendidikan

1. Perguruan Tinggi : 61.333 Orang
2. SMA : 99.959 Orang
3. SMP : 150.125 Orang
4. SD : 370.055 Orang

Adapun sekolah-sekolah yang ada:

1. SMA Negeri : 16 Sekolah
2. SMA Swasta : 9 Sekolah
3. SMP Negeri : 77 Sekolah
4. SMP Swasta : 39 Sekolah
5. SMK : 31 Sekolah
6. SD : 468 Sekolah
7. Perguruan Tinggi : 1 Sekolah

4.1.3 Jumlah Kendaraan di Purbalingga

Kepadatan arus lintas di suatu wilayah sangat tergantung dari kepadatan jumlah penduduk. Purbalingga memiliki 930.274 jiwa yang terdiri dari 471.836 laki-laki dan 458.888 perempuan. Makin banyak jumlah penduduk, makin banyak kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut dalam melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai sarana transportasi. Selain faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang melintas dari daerah lain menuju ke wilayah Purbalingga dan menuju ke wilayah lainnya.

Tabel 4.1

Jumlah Kendaraan Bermotor di Purbalingga Tahun 2016

NO	JENIS KENDARAAN	UNIT
1.	Sepeda Motor	192.395
2.	Mobil Penumpang	9.504
3.	Bus	366
4.	Mobil Barang	6.613
5.	Kendaraan Khusus	60
JUMLAH		208.938

Sumber: Intel Dasar Polres Purbalingga 2016

Dari data di atas, sepeda motor mempunyai jumlah yang tinggi yaitu sebanyak 192.395 unit. Melihat jumlah kendaraan sepeda motor yang cukup besar ini, tentunya akan menambah kepadatan arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga, sehingga kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas juga cenderung mudah terjadi.

4.1.4 Personil

Jumlah anggota Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga sejumlah 5 (lima) Personil yang terdiri dari:

- a. Perwira : 1 (satu) orang
- b. Bintara : 4 (empat) orang

Tabel 4.2

Data Personel Unit Dikyasa Polres Purbalingga

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	NRP/NIP	HP
1.	HARTOKO	IPDA	KANIT DIKYASA	67010039	081327736714
2.	TEGUH RIYANTO, AMD	BRIGADIR	ANGGOTA	85052267	085743264070
3.	RIZKY, SH	BRIGADIR	ANGGOTA	88030414	085726332356
4.	TRI ARIYANI, SH	BRIPTU	ANGGOTA	90100030	085222600708
5.	LITA	BRIPDA	ANGGOTA	96040507	081390778706

	ANGGRAENI				
--	-----------	--	--	--	--

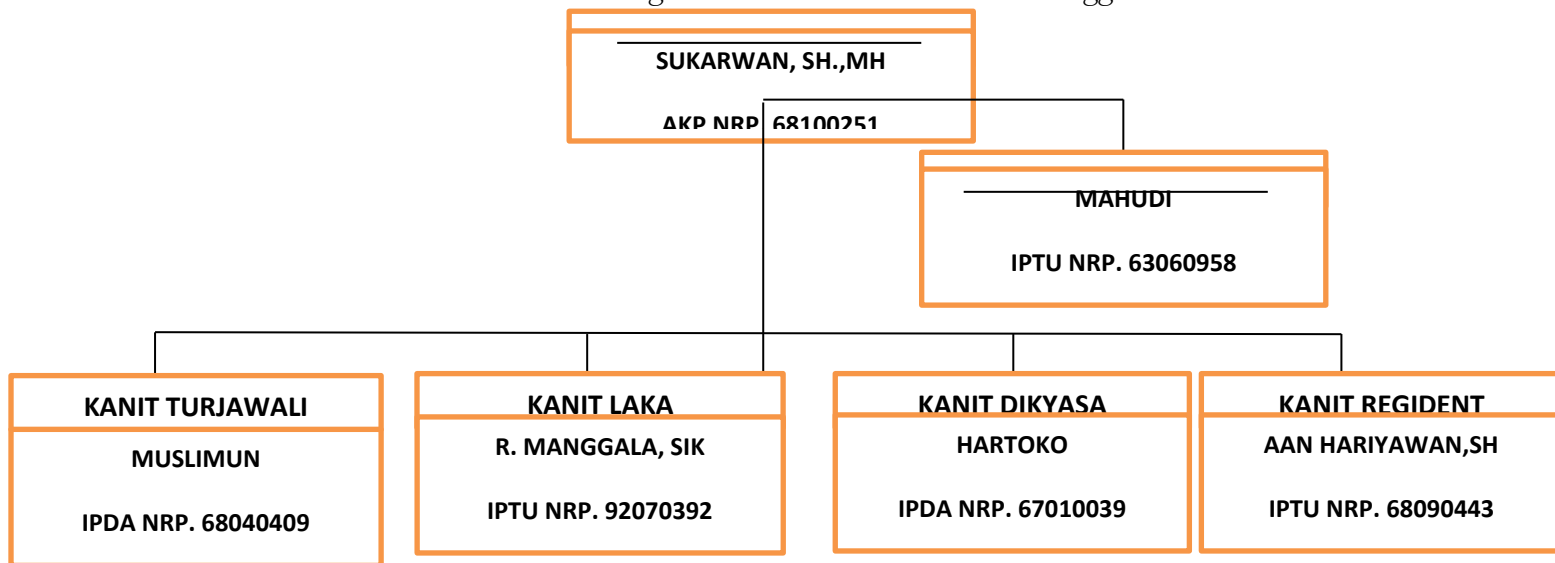
Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga 2016

Dari data di atas, jumlah anggota satuan lalu lintas untuk Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga menunjukkan masih kurang dimana sangat tidak sesuai dengan beban kerja, jumlah sekolah serta pelajar yang ada di wilayah hukum Polres Purbalingga dalam hal memberikan dikmas lantas khususnya terhadap pelajar dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

4.1.5 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas dan Unit Dikyasa Lantas

Struktur organisasi satuan lalu lintas berada di bawah Kapolres langsung yang mana dipimpin oleh Kasat Lantas yang mana juga membawahi Kanit Laka, Kanit Regident, dan Kanit Patroli. Adapun struktur organisasi satuan lalu lintas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Satlantas Polres Purbalingga



4.1.6 Pelanggaran Lalu lintas

Fakta terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga ditunjukkan melalui data pelanggaran lalu lintas yang ada di Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga. Adapun data pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi pelaku pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar Jumlah Pelanggaran Lalu lintas

Ditinjau dari Segi Profesi

NO	TAHUN	PROFESI PELANGGARAN LANTAS				
		PNS	MAHASISWA	PELAJAR	POLRI	TNI
1.	2015	14	17	99	0	0
2.	2016	23	19	115	0	1
JUMLAH		37	36	214	0	1

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga 2016

Dari data di atas, dapat dilihat adanya kenaikan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar dari 99 (sembilan puluh sembilan) ke 155 (seratus lima puluh lima) ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran yang dilakukan oleh pelajar.

Kemudian data pelanggaran lalu lintas berdasarkan kendaraan dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas

Ditinjau dari Jenis Kendaraan

NO	TAHUN	JENIS KENDARAAN BERMOTOR				
		BUS	SEPEDA MOTOR	SEDAN	TRUCK	PICK UP
1.	2015(15.239)	95	14.061	357	149	577
2.	2016(21.823)	142	20.311	361	198	811
JUMLAH		237	34.372	718	347	1.388

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga 2016

Dilihat dari data di atas, menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dari jenis kendaran lebih banyak ke sepeda motor dari 14.061 (empat belas ribu enam puluh satu) ke 20.311 (dua puluh ribu tiga ratus sebelas) dengan ini menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Purbalingga dalam berlalu lintas sering menggunakan sepeda motor, tentunya akan menambah padat arus Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga, sehingga kecelakaan dan pelanggaran Lalu Lintas juga cenderung mudah terjadi.

Selanjutnya data pelanggaran lalu lintas berdasarkan segi pendidikan dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.5

Daftar Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas

Ditinjau dari segi Jenis Pelanggaran

NO	TAHUN	MARKA/ RAMBU	SURAT-SURAT	SYARAT PERLENGKAPAN
1.	2014	1.067	14.963	1.277
1.	2015	2.400	9.292	1.547
2.	2016	2.643	12.499	2.500
JUMLAH		6.110	36.754	5324

Sumber : Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga 2016

Dari data diatas, bahwa jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dari segi Jenis Pelanggaran sering dilakukan oleh Masyarakat Purbalingga yaitu pelanggaran dengan surat-surat tidak lengkap berjumlah 36.754 (Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat) yang dimana angka ini lebih besar di bandingkan Jenis Pelanggaran baik dari Marka/Rambu dengan Jenis Pelanggaran kurangnya Syarat Perlengkapan.

Peranan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat terorganisir guna mewujudkan terciptanya sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas agar tercapainya keikutsertaan masyarakat dalam usaha mengurangi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Purbalingga. Pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan perencanaan yang baik, terus-menerus, konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dihadapi, dan pada gilirannya masyarakat menyadari bahwa pelanggaran ataupun masalah lalu lintas adalah tanggung jawab untuk kepentingan bersama, sehingga secara sadar turut membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Purbalingga.

4.2 Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Terhadap Pelajar oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga guna Mengurangi Pelanggar Lantas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga

Unit Dikyasa Lantas merupakan salah satu bagian dari Satuan Lalu Lintas yang mana gabungan dari rekayasa dan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas, maka disebut Unit Dikyasa Lantas. Unit Dikyasa Lantas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengkaji segala permasalahan bidang lalu lintas, terutama yang menyangkut faktor penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.
- Mengadakan penelitian atas unsur-unsur manusia, kendaraan dan prasarana jalan seperti perambuan, marka, peralatan parkir, lokasi penempatan rambu dan tempat pemberhentian bus terutama ditinjau dari segi keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas.

- c. Menyelenggarakan dan membina pelaksanaan kerja sama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan rekayasa di bidang lalu lintas.
- d. Menyelenggarakan administrasi klinik pengemudi/simulator bagi masyarakat pemohon SIM Umum atau peningkatan.
- e. Unit Dikyasa dipimpin oleh Kanit Dikyasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/kewajibannya kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasat Lantas.
- f. Kanit Dikyasa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu para Kasubnit Rekjemen, Kasubnit Dikmas dan Kasubnit Klipeng.

Adapun tugas dan tanggung jawab unit dikyasa lantas dalam hal pendidikan masyarakat bidang lalu lintas yaitu seperti pada poin (c) di atas yang mana harus menyelenggarakan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (dikmas Lantas).

Dikmas lantas dapat dilaksanakan dengan sasaran masyarakat terorganisir seperti pelajar, dikmas lantas terhadap pelajar tersebut dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga. Kegiatan dikmas lantas dapat terlaksana karena adanya perencanaan yang dibuat oleh Unit Dikyasa lantas Polres Purbalingga dan melalui koordinasi antara pihak sekolah dengan Polres Purbalingga dimana untuk pihak sekolah mengirimkan surat permohonan kepada Polres Purbalingga untuk memberikan pelatihan tentang lalu lintas kepada anak didiknya, hal tersebut sebagai bentuk tahapan birokrasi dan koordinasi nyata antara sekolah dan Polres Purbalingga. Kemudian dari surat permohonan tersebut dapat ditunjuk anggota Polres Purbalingga yang menjadi instruktur atau pelatih dengan dibuatkan surat perintah tugas menjadi pelatih atas dasar surat permohonan tersebut. Selanjutnya terjadi komunikasi antara pihak sekolah dan Polres Purbalingga untuk membahas kegiatan tersebut dan dengan adanya komunikasi tersebut dapat ditentukan metode pemberian materi yang tepat dan melalui tahap perencanaan yang baik, sehingga kegiatan yang sudah diajukan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak Polres Purbalingga dan pelaksanaannya dapat menghasilkan bidang lalu lintas tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh anggota Dikmas Lantas Polres Purbalingga yaitu Brigadir Teguh Riyanto, AMD yang menjelaskan bahwa :

Kita sebagai anggota Dikmas Lantas dapat memberikan Pelatihan tentang lalu lintas kepada pelajar dengan adanya komunikasi antara perwira unit dikyasa lantas dengan sekolah, dimana pihak sekolah mengirimkan surat permohonan ke Polres Purbalingga sehingga kita dapat memberikan Dikmas Lantas kepada pelajar yang ada di sekolah. (Wawancara, 6 Maret 2017)

Pernyataan diatas dikuatkan oleh siswa SMA Negeri 1 Purbalingga bernama yang juga pelaku Ketua Patroli Keamanan Sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga, menjelaskan bahwa:

Kami senang bila menerima sosialisasi atau pelatihan tentang lalu lintas dari pihak kepolisian, seperti yang kami laksanakan bulan Januari 2017 lalu

mengenai *safety riding*. Hal tersebut dapat terlaksana karena kami dari patroli keamanan sekolah membuat surat permohonan kepada pihak kepolisian supaya dapat memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang lalu lintas kepada kami dan surat tersebut sebagai pengajuan dari sekolah ke pihak kepolisian, sehingga kegiatan *safety riding* tersebut dapat terlaksana dan diikuti oleh seluruh pelajar SMA negeri 1 Purbalingga. (Wawancara, 6 Maret 2017)

Dikmas lintas terhadap pelajar dilaksanakan di sekolah dengan cara menyesuaikan dengan materi yang akan diberikan dimana seperti halnya kegiatan *safety riding* yang terlaksana di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri Karanganyar yaitu langsung dengan peragaan dari anggota lalu lintas Polres Purbalingga, kemudian seperti pembentukan dan pembinaan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kalimantan pada bulan Mei 2016 dilaksanakan dengan paparan dan peragaan sesuai dengan materi yang disampaikan untuk mendukung pelaksanaan tugas PKS sehari-hari, dimana materi yang diajarkan antara lain:

- a. Peraturan – peraturan dasar lalu lintas.
- b. Rambu – rambu lalu lintas.
- c. Pengaturan lalu lintas, khususnya cara – cara menyebrang.
- d. Senam lalu lintas, khususnya gerakan – gerakan dasar pengaturan lalu lintas dengan tangan.
- e. Peraturan Baris – Berbaris.
- f. Pengetahuan dasar PPPK.
- g. Disiplin / sopan satuan lalu lintas.
- h. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian secara terbatas sesuai dengan tingkat kecerdasan.

Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga juga melaksanakan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan di taman lalu lintas dan polsisi sahabat anak, dimana taman lalu lintas adalah suatu taman atau tempat yang dimuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas (rambu-rambu), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang cara berlalu lintas, sopan santun dan kesadaran lalu lintas. Tidak hanya itu, berkaitan dengan program dari satuan lalu lintas mengenai slogan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan aturan-aturan berlalu lintas yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK di daerah Purbalingga.

Hambatan yang peneliti temukan berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Perwira Unit Dikyasa Lalu Lintas Ipda Hartoko, diantaranya seperti waktu yang digunakan untuk kegiatan dikmas lintas terhadap pelajar

karena seringnya terkendala dengan waktu yang diberikan oleh sekolah karena tuntutan pemenuhan jam pelajaran siswa.

Dalam pelaksanaan kegiatan dikmas lintas terhadap pelajar oleh Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga selain dari yang didukung anggaran lembaga, juga ada dukungan partisipasi dari pihak lain yang terkait dengan lalu lintas yaitu dukungan partisipasi dari pihak *dealer* sepeda motor yang mana realisasinya seperti dalam pelaksanaan kegiatan dikmas lintas tentang *Safety Riding* kepada masyarakat melalui penling, media elektronik, spanduk dan baliho. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi dari Everest M. Rogers yang dikutip dari Hafied Cangara (2006:19)

Melalui pengamatan dan wawancara terhadap pelaksanaan tugas pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas terhadap pelajar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga khususnya Unit Dikyasa Lintas, telah menerapkan teori manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry bahwa fungsi manajemen meliputi *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling*. Serta pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lintas).

Adapun teori manajemen menurut G.R. Terry yang telah diterapkan oleh Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga dalam memberikan Dikmas Lintas terhadap pelajar sebagai berikut:

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan kegiatan merupakan tahap awal dalam terselenggaranya suatu kegiatan, yang mana sangat menentukan dalam pencapaian tujuan. Perencanaan yang dimaksud menurut G.R. Terry adalah:

- a. Menentukan keadaan organisasi sekarang.
- b. Melakukan survei lingkungan.
- c. Menentukan tujuan.
- d. Meramalkan keadaan-keadaan yang akan datang.
- e. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- f. Melakukan pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan.
- g. Melakukan perubahan dan penyesuaian dengan keadaan yang berubah-ubah.
- h. Melakukan komunikasi secara terus-menerus selama proses perencanaan.

Berkaitan dengan perencanaan dalam memberikan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga terhadap pelajar dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas telah melakukan perencanaan sesuai seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, dimana kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas terhadap pelajar dimulai dari adanya perencanaan kegiatan yang dibuat dalam Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga

kemudian pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas berdasarkan permintaan pihak sekolah dengan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan Depdikbud Purbalingga dimana hal ini langsung kepada kepala sekolah yang bersangkutan yang mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Masyarakat di bidang lalu lintas di sekolahnya, selanjutnya terjadi komunikasi antara pihak sekolah dan Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga untuk menentukan materi dan metode serta hal-hal yang perlu disiapkan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berlanjut dari hasil koordinasi tersebut maka instruktur atau pelatih yang akan menyampaikan juga perlu disesuaikan supaya tepat dalam memilih instruktur atau pelatih yang selanjutnya akan dibuatkan Surat Perintah (Sprin) pelaksanaan tugas sebagai instruktur atau pelatih. Namun, dalam hal ini pihak kepolisian juga dapat melakukan kegiatan Dikmas Lantas secara proaktif dengan pihak sekolah untuk memberikan Pendidikan Masyarakat bidang lalu lintas dengan mendasarkan pada perencanaan yang telah dibuat, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian yang menjadi sasaran kegiatan dikmas lantas kemudian menentukan metode yang tepat dalam menyampaikan materi supaya mudah dipahami dan diterapkan oleh pelajar dan mengetahui jumlah peserta yang akan dilatih serta waktu pelaksanaannya. Sehingga dapat menentukan anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan guna terselenggaranya kegiatan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas terhadap pelajar, dan kegiatan tersebut dapat berjalan secara lancar kemudian memperoleh hasil yang maksimal. Berkaitan dengan penganggaran dalam memberikan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga terhadap pelajar dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas agar terciptanya kamseltibcar lantas merupakan bentuk dukungan dari pelaksanaan kegiatan dikmas lantas yang melalui perencanaan sebelumnya. Hal ini juga sebagaimana yang ada dalam petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pendidikan Masyarakat bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) yaitu adanya perencanaan, menentukan metode, menentukan jumlah peserta, menentukan instruktur/pelatih, menentukan waktu dan tempatnya, serta menentukan dukungan anggaran dan sarana prasarannya yang mana ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dan pembuatan rencana kegiatan baik harian, bulanan, dan tahunan dari Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga.

4.2.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan tahap selanjutnya setelah pelaksanaan perencanaan kegiatan dimana adanya pembagian dan pengaturan tugas kepada setiap individu secara jelas serta penentuan hubungan-hubungan diantara individu tersebut. Pengorganisasian yang dimaksud oleh G.R. Terry yaitu:

- a. Tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b. Bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
- c. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi.
- d. Tentukan persyaratan-persyaratan setiap posisi.

- e. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
- f. Bagi-bagikan pekerjaan, pertanggung jawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.
- g. Ubah dan sesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah.
- h. Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.

Berkaitan dengan pengorganisasian dalam memberikan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Dikyasa Lalu Lintas Polres Purbalingga terhadap pelajar dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas agar terciptanya kamseltibcar lantas tentunya berawal dari tahap perencanaan yang baik kemudian berlanjut dalam tahap pengorganisasian. Dalam hal ini, Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga dalam tahapan pengorganisasian melakukan pembagian tugas kepada anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas yang kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat perintah tugas (SPRINGAS) yang dibuat untuk kegiatan dikmas lantas, kemudian dalam memberikan materi disesuaikan dengan yang telah direncanakan sebelumnya kepada pelajar baik praktek maupun teori dengan metode yang tepat dimana materi tersebut bertujuan untuk menanamkan kebiasaan agar pelajar mengetahui dan memahami berlalu lintas yang benar dan sesuai aturan, serta materi yang disampaikan dapat sebagai bekal ilmu dalam kehidupannya sehari-hari dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, karena hal ini juga terdapat dalam petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) bahwa dikmas lantas merupakan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas agar dapat mengurangi pelanggaran Lalu Lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan yang dilaksanakan terhadap pelajar.

4.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan wujud nyata dari perencanaan dan pengorganisasian suatu kegiatan, seperti yang dikemukakan oleh G.R. Terry bahwa pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut oleh karena itu para anggota juga ingin mencapai sasaran tersebut. Pelaksanaan yang dimaksud oleh G.R. Terry, yaitu:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Berkaitan dengan pelaksanaan dalam memberikan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas khususnya Unit Dikyasa Lalu Lintas Polres Purbalingga terhadap pelajar dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas agar terciptanya Kamseltibcar Lantas tentunya berawal dari adanya perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya dimana terdapat tujuan yang ingin dicapai dan anggota mengetahui hal tersebut, kemudian anggota mendapatkan arahan dan bimbingan dari pimpinan unit dikyasa lantas sebelum melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas terhadap pelajar. Dengan adanya tujuan dan arahan dari pimpinan yang diketahui oleh anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas maka menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dalam melaksanakan kegiatan dikmas lantas, namun di sisi lain juga perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dikmas lantas dapat terlaksana dengan baik tentunya tidak lepas dari adanya dukungan anggaran atas kegiatan dikmas lantas tersebut dan materi yang akan disampaikan juga sudah jelas sesuai dengan dasar hukum yang ada. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) bahwa dalam tahap pelaksanaan berkaitan dengan memberikan materi dan penugasan pada sasaran dikmas lantas dimana dalam hal ini adalah pelajar.

4.2.4 Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu adanya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud oleh G.R. Terry adalah:

- a. Tetapkan ukuran-ukuran.
- b. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran.
- c. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi.
- d. Berhubungan selalu selama proses pengawasan.

Berkaitan dengan pengawasan dalam memberikan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga terhadap pelajar dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas agar terciptanya kamseltibcar Lantas merupakan serangkaian kegiatan menagawasi dan mengevaluasi kegiatan mulai dari perencanaan yang dilaksanakan hingga pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan, dimana kegiatan yang dilaksanakan didukung dengan anggaran sehingga semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dikmas lantas sehingga untuk kedepannya kegiatan dikmas lantas dapat berjalan lebih baik lagi dan terselenggaranya kegiatan dikmas lantas terhadap pelajar secara konsisten, terus-menerus dan berkesinambungan seperti halnya yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) yaitu pada tahap penilaian terdapat analisa atas pelaksanaan dikmas lantas, penilaian kekurangan

dan keberhasilan kegiatan serta membuat rencana periode pelatihan berikutnya supaya dikmas lintas dapat berjalan dengan baik secara terencana, terus-menerus dan berkesinambungan guna menanamkan kesadaran pribadi berlalu lintas yang tertib, sopan dan santun.

Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan peneliti pada kegiatan Dikmas Lintas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga terhadap pelajar masih kurang optimal, karena kurangnya SDM, sehingga setiap melaksanakan kegiatan Dikyasa Lintas yang dilakukan oleh Anggota Dikmas Lintas pasti yang sering memberikan sosialisasi adalah Brigadir Teguh Riyanto, AMD karena bapak Teguh satu-satunya anggota Dikmas Lintas yang sudah atau pernah mengikuti Dikjur Dikmas Lintas sehingga untuk memperoleh hasil yang maksimal agar terciptanya Kamseltibcar Lintas di wilayah Hukum Polres Purbalingga masih sulit karena kurangnya anggota yang mempunyai serta kesadaran pribadi dalam berlalu lintas dari masyarakat belum tinggi yang mana ditandai dengan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang tinggi serta terjadinya kemacetan lalu lintas.

Hal ini terjadi karena masyarakat masih memiliki pengetahuan yang sangat sedikit mengenai tata cara berlalu lintas yang benar dan sesuai aturan. Namun, jika masyarakat dapat memperoleh pendidikan bidang lalu lintas tentang cara berlalu lintas yang benar sesuai dengan aturan sejak sekolah maka akan mudah menjadikan disiplin berlalu lintas itu sebagai karakter dari namun tentunya semua itu akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik karena anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan dikmas lintas ini sudah sesuai dan mencakup seluruh kebutuhan.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan analisa kegiatan Pendidikan Masyarakat yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas guna mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga

Seperti yang penulis amati dan temukan pada seluruh kegiatan Dikmas Lintas terhadap pelajar, ternyata Pendidikan Masyarakat dapat dioptimalkan guna mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga karena para pelajar sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh anggota Pendidikan Masyarakat sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya pelanggaran, Karena dengan memberikan Pendidikan Masyarakat terorganisir kepada para pelajar atau usia dini pelanggaranpun dapat diminimalisir serta mengajak para pelajar untuk mensosialisasikan etika berlalu lintas yang sudah disampaikan oleh anggota Pendidikan Masyarakat kepada orang tua atau teman – temannya sehingga materi yang disampaikan oleh anggota Pendidikan Masyarakat dapat dipahami dan dimengerti.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti maka ditemukan adanya optimalisasi Pendidikan Masyarakat oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Purbalingga guna mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepala sekolah SMA 1 Purbalingga, yang mengatakan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang lalu lintas dari pihak Polres Purbalingga diterima dengan senang oleh anak-anak didik kami. Hal tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kami dan anak-anak didik, kemudian hal tersebut juga dapat membantu kami dalam mendidik anak-anak didik kami untuk membentuk karakter kedisiplinan dalam dirinya dan khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas sehingga aman dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, dan mereka juga dapat memberitahukan kepada orang tua ataupun teman-temannya tentang pengetahuan yang mereka dapat sehingga anak-anak sekarang khususnya para pelajar dapat mematuhi peraturan lalu lintas. (Wawancara, 6 Maret 2017)

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah SMA 1 Purbalingga maka Pendidikan Masyarakat dapat diimplementasikan oleh Unit Dikyasa Satlantas guna mengurangi pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Purbalingga.

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas terhadap Pelajar Yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga guna Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga

Seperti yang diamati dan ditemukan penulis pada seluruh kegiatan Dikmas Lantas terhadap pelajar, ternyata pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas tidak dapat serta merta terlaksana dengan sempurna begitu saja tentunya ada beberapa hal yang bisa menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan, termasuk kegiatan Dikmas Lantas terhadap pelajar. Keterangan mengenai hal tersebut diperoleh berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada pelaksana kegiatan Dikmas Lantas terhadap pelajar.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti maka ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan dikmas lantas terhadap pelajar, yang mana penulis kelompokkan secara umum menjadi faktor internal yaitu faktor dari dalam unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga. Antara lain sebagai berikut :

4.4.1 Faktor Internal

a. Kelemahan:

1. Keterbatasan sumber daya manusia di Unit Dikyasa Lantas dalam hal jumlah anggota yang dimana jumlah dari anggota Dikmas Lantas di Polres Purbalingga hanya 5 orang dimana 1 Kanit dan 4 anggota.
2. Pelatihan pemahaman perundang-undangan dan pengetahuan lalu lintas anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas dilakukan oleh masing-masing personil anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas dimana dari 5 orang

yang bertugas di Dikmas Lantas hanya 1 orang yang pernah mengikuti dikjur Dikmas yaitu Brigadir Teguh Riyanto, AMD

b. Kekuatan:

1. Anggota Unit Dikyasa masih memiliki Disiplin yang tinggi sehingga dalam pekerjaannya dapat di kerjakaan dengan baik.
2. Salah satu Anggota Unit Pendidikan Masyarakat sudah mengikuti Dikjur Lantas tentang Pendidikan Masyarakat sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Juklak Kapolri: Juklak/05/V/2003

4.4.2 Faktor Eksternal

Kelemahan:

1. Citra Kepolisian di mata masyarakat masih belum baik yang mana akan berdampak pada kesediaan partisipasi masyarakat.
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat, tanggapan dan dukungan dari instansi samping dengan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kesadaran pelajar mengenai disiplin berlalu lintas masih kurang dalam hal mematuhi aturan lalu lintas.

Kekuatan:

1. Pelajar sangat antusias dengan Materi yang diberikan oleh Pendidikan Masyarakat Satlantas sehingga pelajar dapat mengetahui dan memahami ketentuan dalam Berlalu Lintas.
2. Guru di daerah sekolah Purbalingga juga mendukung adanya pemberian Materi yang diberikan kepada Pelajar sehingga para pelajar dapat mematuhi aturan yang berlaku dalam Berlalu Lintas dan para guru juga dapat mengetahui dan memahami Materi yang diberikan oleh Pendidikan Masyarakat Satlantas

Hal tersebut di atas yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dikmas lantas terhadap pelajar juga seperti dikatakan oleh Kepala Sekolah SMA 1 Muhammadiyah Purbalingga, yang mengatakan bahwa sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang lalu lintas dari pihak Polres Purbalingga diterima dengan senang oleh anak-anak didik kami. Hal tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kami dan anak-anak didik, kemudian hal tersebut juga dapat membantu kami dalam mendidik anak-anak didik kami untuk membentuk karakter kedisiplinan dalam dirinya dan khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas sehingga aman dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, selanjutnya juga dapat memperbaiki citra polisi yang masih negatif menurut pandangan anak didik kami terhadap polisi. (Wawancara, 6 Maret 2017)

Berdasarkan pada faktor internal, dan eksternal serta wawancara terhadap Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga ini tentunya akan dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan Dikmas Lantas

terhadap pelajar. Faktor Internal seperti tidak ada fokus kegiatan atau pengkhususan kegiatan sehingga kegiatan Dikmas Lantas terhadap pelajar dapat terlaksanakan secara konsisten maka hasilnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat karena hasil dari Dikmas Lantas berdampak pada jangka panjang dan membutuhkan proses dimana secara tidak langsung akan menanamkan citra yang baik pada Polri melalui hal berlalu lintas dan akhirnya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan dan memelihara Kamseltibcar Lantas serta mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga. Kemudian berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam hal jumlah anggota Unit Dikyasa Satlantas dan pelatihan pemahaman perundang-undangan dan pengetahuan lalu lintas anggota Unit Dikyasa Lantas dilakukan oleh masing-masing personel anggota Unit Dikyasa Lantas dapat diperbaiki dengan diadakannya penambahan personil di Unit Dikyasa Lantas dan kegiatan pelatihan kepada anggota Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga secara bersama yang diselenggarakan oleh bagian Sumber Daya (Bag Sumda), karena dalam Bag Sumda terdapat fungsi pembinaan dan administrasi personel yang mana sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pada pasal 22 ayat (3) huruf (a) bahwa salah satu tugas Bag Sumda adalah mengadakan pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung, dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Bag Sumda tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan anggota Unit Dikyasa Lantas dalam hal pendidikan masyarakat bidang lalu lintas sehingga dapat menambah kepercayaan diri dan semangat anggota Unit Dikyasa Lantas untuk melaksanakan tugasnya dalam hal memberikan pelatihan ataupun menyampaikan materi pendidikan masyarakat bidang lalu lintas terhadap pelajar. Selanjutnya dalam memperbaiki faktor-faktor eksternal diperlukan peningkatan komunikasi yang baik dengan instansi yang terkait guna mendapat dukungan kegiatan Dikmas Lantas terhadap pelajar sehingga pelajar dapat mengetahui dan mengikuti kegiatan dikmas lantas secara proaktif.

4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas oleh Unit Dikyasa Satlantas terhadap Pelajar guna Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga

Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan peneliti, Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga menyadari dan mengetahui bahwa kegiatan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas yang dilakukan terhadap pelajar menemui hambatan dan kendala sehingga perlu adanya optimalisasi untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat meningkatkan Dikmas Lantas terhadap pelajar.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga khususnya Unit Dikyasa lantas antara lain:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan kepada pelajar sekolah di setiap kali ada program kebijakan baru mengenai lalu lintas melalui koordinasi dengan pihak sekolah sehingga dapat diketahui pelajar sekolah kemudian dapat dilaksanakan untuk dipatuhi, misalnya seperti sosialisasi slogan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
- b. Dalam pelaksanaan dikmas lintas terhadap pelajar salah satunya pada penerimaan siswa baru di sekolah saat pengenalan kegiatan ekstrakurikuler, oleh unit dikyasa lintas menyampaikan tentang disiplin berlalu lintas dan menginformasikan adanya kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dengan menekankan bahwa PKS merupakan perpanjangan tangan Polisi dalam rangka membantu mengatur lalu lintas dan memberikan gambaran serta memberitahukan kepada sesama rekannya tentang pendidikan lalu lintas.
- c. Berkaitan dengan kegiatan dikmas lintas terhadap pelajar melalui ekstrakurikuler PKS yang dilakukan Unit Dikyasa Lintas, dengan membentuk PKS mulai dari tingkat SD hingga SMA sebagai langkah awal guna memperkenalkan tata cara berlalu lintas yang benar dan sesuai dengan aturan sejak dini kepada pelajar sekolah.
- d. Melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan kota Purbalingga terkait dengan pendidikan lalu lintas melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan yang disahkan oleh Bupati Purbalingga.
- e. Membuat taman lalu lintas untuk para pelajar sekolah sehingga dapat memperoleh gambaran nyata dalam belajar tata cara berlalu lintas yang mana pembuatannya dimulai dari pendidikan tingkat TK hingga SMA.
- f. Membuat inovasi baru dengan menggunakan "Wayang Lintas" dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelajar agar mempermudah komunikasi yang diberikan dari anggota dikmas lintas kepada para masyarakat terutama pelajar sehingga dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Purbalingga.
- g. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menjadi inspektur Upacara saat upacara bendera di sekolah dimana dalam amanat upacara tersebut juga diberikan sosialisasi tentang cara berlalu lintas yang benar dan menyampaikan program-program lalu lintas.

Upaya tersebut diatas seperti yang diungkapkan oleh Perwira Unit Lintas Ipda Hartoko, yang menyatakan bahwa:

Upaya dari satuan lalu lintas Polres Purbalingga khususnya saya selaku perwira Unit Dikyasa Lintas yaitu kita lakukan upaya pendekatan dengan cara memberikan penyuluhan kepada pelajar mengenai kebijakan terbaru dalam bidang lalu lintas seperti saat menjadi inspektur upacara dan membuatkan taman lalu lintas seperti di TK kemala Bhayangkari 01 Purbalingga melalui dukungan anggaran yang ada kemudian menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler PKS pada penerimaan siswa baru bahwa PKS itu bukan seperti yang teman-teman sekolah katakan, yaitu sebagai tukang parkir. Namun itu sebagai perpanjangan tangan polisi dalam rangka untuk memberikan pendidikan lalu lintas atau memberikan gambaran dikmas lintas bahwa masalah lalu lintas kira-kira kayak begini jadi memberikan gambaran yang salah seperti ini dan yang benar seperti ini. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Pernyataan diatas dikuatkan oleh Bapak selaku kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, yang mengatakan bahwa:

Upaya yang kita lakukan untuk menanamkan disiplin berlalu lintas kepada pelajar, kita lakukan melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian seperti kerjasama dalam sosialisasi narkoba, menjadi inspektur upacara dan memberdayakan PKS, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di SMP, SMA, dan SMK bersama dengan pembina OSIS dan guru Olahraga agar di satuan pendidikan masing-masing diadakan penanaman disiplin berlalu lintas sehingga tidak terjadi putus komunikasi kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan antara dinas dengan sekolah dan siswa. Prinsipnya dinas mendukung dan mengupayakan agar koordinasi dengan kepolisian terus berjalan.(Wawancara, 6 Maret 2017)

Kemudian dikuatkan juga oleh siswa SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga bernama Agung, menjelaskan bahwa:

Di SMA kami pernah dikunjungi pak polisi dan diberi pengarahan tentang etika berlalu lintas dan mengenai menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Hal tersebut sangat menambah wawasan kami dan kami sangat senang menerimanya.(Wawancara, 6 Maret 2017)

Berdasarkan data-data diatas maka pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas dan sebagai upaya pencegahan dalam menanggulangi masalah lalu lintas serta sebagai salah satu sarana untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu lintas dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas agar dapat menciptakan kamseltibcar lantas.

Peranan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat terorganisir guna mewujudkan terciptanya sikap mental untuk mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas agar tercapainya keikutsertaan masyarakat dalam usaha mengurangi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Purbalingga. Pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan perencanaan yang baik, terus-menerus, konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dihadapi, dan pada gilirannya masyarakat menyadari bahwa pelanggaran ataupun masalah lalu lintas adalah tanggung jawab untuk kepentingan bersama, sehingga secara sadar turut membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Purbalingga.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga ini tentunya untuk mengoptimalkan Dikmas Lantas terhadap pelajar dalam rangka mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas agar terciptanya Kamseltibcar lantas di wilayah Hukum Polres Purbalingga. Upaya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Lantas Polres Purbalingga sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dimana kegiatan dikmas lantas

dengan memberikan penerangan dan penyuluhan kepada para pelajar dengan metode yang mudah dipahami oleh para pelajar, salah satunya menampilkan foto dan video yang berkaitan dengan pembinaan dan pembentukan PKS mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan Unit Dikmas Lantas terhadap pelajar juga membuat taman lalu lintas dan permainan wayang Lantas untuk pelajar sehingga pelajar mengerti dan memahami secara utuh materi yang disampaikan dan dapat dijadikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari serta mudah dalam menerapkannya dan hal ini juga terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) bahwa tujuan dari pembuatan Taman Lalu Lintas adalah sebagai model pendidikan terapan kepada anak-anak secara langsung dapat diaplikasikan di tempat bermain melalui penanaman nilai budaya disiplin dan tertib berlalu lintas. Selanjutnya dalam hal melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menjadi Inspektur Upacara saat upacara bendera di sekolah dengan memberikan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan menyampaikan program-program lalu lintas merupakan upaya yang dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) yang mana hal tersebut masuk dalam penerangan Lalu Lintas, yaitu kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan-gagasan atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak menerima pesan, bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan juru penerang (Komunikator), dan cara ini termasuk mengefektifkan kegiatan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas terhadap pelajar serta menghemat biaya dan memudahkan birokrasi pelaksanaan kegiatan dikmas lantas terhadap pelajar. Kemudian Unit Dikyasa Lantas dalam memberikan pelatihan juga menerapkan teori manajemen menurut G.R. Terry dimana melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan yang mana disesuaikan dengan dukungan anggaran yang ada. Serta menerapkan teori komunikasi organisasi dari Everest M. Rogers yang dikutip dari Hafied Cangara (2006:19) dan teori komunikasi Suryo Subroto untuk mensosialisasikan peranan-peranan Dikmas Lantas melalui penerangan keliling, video, photo kegiatan Lantas maupun ceramah-ceramah Dikmas Lantas kepada pelajar.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Optimalisasi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas oleh Unit Dikyasa Satlantas terhadap pelajar guna mengurangi Pelanggaran lantas di wilayah hukum Polres Purbalingga, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan dikmas lintas yang dilakukan oleh unit dikyasa lintas guna mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga saat ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hal tersebut di tandai dengan adanya petunjuk pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lintas) mulai dengan adanya tahap perencanaan dan persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penelitian.
2. Bahwa pelaksanaan dikmas lintas yang dilakukan oleh unit dikyasa lintas di wilayah hukum Polres Purbalingga belum dapat berjalan secara optimal karena di Polres Purbalingga kurangnya kejuruan yang diterima oleh anggota unit Dikyasa Polres Purbalingga yang menyebabkan kurangnya pemahaman materi dari Pendidikan Masyarakat sehingga pemberian materi yang diberikan oleh anggota unit dikyasa kepada masyarakat khususnya pelajar kurang maksimal sehingga mereka kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang aturan-aturan dalam berlalu lintas.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dikmas Lintas terhadap pelajar oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas dalam rangka mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Purbalingga ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor-faktor tersebut dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan Dikmas Lintas terhadap pelajar. Faktor Internal dapat diperbaiki dengan merinci kegiatan dan meningkatkan anggaran tersebut dalam DIPA satuan Lalu Lintas berdasarkan pada kebutuhan pelaksanaan dilapangan sehingga kegiatan dapat berjalan secara konsisten dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang mana secara tidak langsung akan menanamkan citra yang baik pada Polri melalui hal berlalu lintas dan akhirnya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas agar terciptanya Kamseltibcar Lintas di wilayah Hukum Polres Purbalingga, kemudian berkaitan dengan keterbatasan personel dapat diperbaiki dengan diadakannya penambahan personel di unit dikyasa lintas dan kegiatan pelatihan kepada anggota Unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga secara bersama yang diselenggarakan oleh Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) sehingga dapat meningkatkan kemampuan, wawasan dan kemampuan anggota unit Dikmas Lintas dalam hal pendidikan masyarakat bidang lalu lintas selanjutnya dapat menambah kepercayaan diri dan semangat anggota unit Dikyasa Lintas untuk melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan faktor-faktor eksternal dalam memperbaikinya diperlukan peningkatan komunikasi yang baik dengan instansi yang terkait guna mendapat dukungan kegiatan Dikmas Lintas terhadap pelajar sehingga pelajar dapat mengetahui dan mengikuti kegiatan Dikmas Lintas secara Proaktif. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi Everest dan Suryo Broto
4. Optimalisasi yang telah dilakukan khususnya oleh unit Dikyasa Lintas Polres Purbalingga untuk mengoptimalisasi Dikmas Lintas terhadap pelajar dalam rangka mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Purbalingga sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan

Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lintas) dimana kegiatan Dikmas Lintas dengan memberikan penerangan dan penyuluhan kepada para pelajar dengan metode yang mudah dipahami para pelajar yaitu seperti membuat taman lalu lintas untuk pelajar sehingga pelajar mengerti dan memahami secara utuh materi yang disampaikan dan dapat dijadikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari serta mudah dalam menerapkannya meskipun tidak berada disituasi jalan raya yang sebenarnya dan menjadi inspektur Upacara saat Upacara bendera di sekolah dengan memberikan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan menyampaikan program-program lalu lintas dimana cara ini termasuk mengefektifkan kegiatan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas terhadap pelajar serta menghemat biaya dan memudahkan birokrasi pelaksanaan kegiatan dikmas lintas terhadap pelajar, kemudian Unit Dikyasa Lintas dalam memberikan pelatihan juga menerapkan teori manajemen menurut G.R. Terry dimana melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan yang mana disesuaikan dengan dukungan anggaran yang ada. Serta menerapkan teori komunikasi Everest dan Suryo Broto dalam mengkomunikasikan program Dikmas Lintas.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Optimalisasi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas oleh Unit Dikyasa Satlantas guna mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Purbalingga, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Disarankan Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga mengajukan rencana anggaran dinas (Ren Gar Dis) kepada Kasatker dalam hal ini adalah Kapolres Purbalingga tentang kegiatan Dikmas Lintas terhadap pelajar dengan menggunakan sistem Bottom Up, yaitu mendasarkan pada kebutuhan di lapangan sehingga kebutuhan pelaksanaan dan anggota Dikmas Lintas dapat terpenuhi.
- b. Untuk mengoptimalkan pendidikan masyarakat oleh Unit Dikyasa Satlantas guna mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polres Purbalingga Disarankan untuk Satuan Polres Purbalingga memberikan atau melaksanakan Dikjur agar para anggota dapat memahami dan mengetahui pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik, kemudian perlunya penambahan personil Unit Dikyasa Satlantas agar tugas yang diberikan kepada anggota Unit Dikyasa Satlantas dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga pelanggaran yang terjadi di Polres Purbalingga berkurang.
- c. Disarankan untuk Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga membuat dan mencetak buku pedoman atau paduan tentang Dikmas Lintas dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Juklak Kapolri No.Pol:

- Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas).
- d. Guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas pelajar, salah satunya dengan melakukan kerja sama antara pihak sekolah dengan kepolisian dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) maka disarankan untuk membuat adanya kegiatan PKS yang dimana dengan adanya kegiatan PKS merupakan perpanjangan tangan polisi dalam rangka membantu mengatur lalu lintas dan memberikan gambaran serta memberitahukan kepada sesama rekannya tentang Pendidikan lalu lintas, dengan membentuk PKS mulai dari tingkat SD hingga SMA sebagai langkah awal guna memperkenalkan tata cara berlalu lintas yang benar dan sesuai dengan aturan sejak dini kepada pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

AGIL, SAMPURNA. 2012 *“Optimalisasi Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelajar Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga”*. Skripsi, Jakarta : PTIK

Terry, George R. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.

Earlyanti, Novi Indah. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Tera Riset

Sumber Produk Lembaga :

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol : Juklak/5/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas)

Sumber Internet :

<http://www.kbbi.web.id>

<http://www.scribd.com/doc/38162458/Makalah-Seminar>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>